

TINGKAT RESISTENSI CALON KEPALA DAERAH NON MUSLIM PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN 2015

Oleh

Suwardi¹ dan Aris Tri Haryanto²
Dosen FISIPOL UNISRI Surakarta

Abstrak

Pemilihan Walikota Kota Surakarta 2015 menempatkan isu agama sebagai bagian penting. Calon walikota bergama non – islam lebih mengedepankan visi nasionalisme guna menyakinkan pemilih yang mayoritas beragama islam. Sebaliknya calon walikota bergama muslim menjadikan agama islam sebagai bagian strategi menarik dukungan. Hasil Pilkada 9 Desember 2015 tentu bukan resultante pertarungan ideologi nasionalis versus islam. Pasangan FX Hadi Rudyatmo – Achmad Purnomo unggul perolehan suara pemilih 60%. Pasangan Anung Indro Susanto – Muhammad Fajri 41% suara pemilih. Tehnik penarikan sample *multistage random sampling*. Kerangka sampling berupa daftar pemilih tetap (DPT) pada 58 titik lokasi survey (TLS) yang telah diacak. Keseluruhan sampel berjumlah 580 responden. Hasil penelitian menunjukkan peta politik ideologis kota Surakarta menunjukkan aspirasi kepemimpinan muslim ditunjukkan dengan penolakan kepemimpinan non – islam sebesar 26%. Selebihnya 74% menyatakan permisip terhadap calon walikota non muslim.

Kata kunci: Pilkada, non-muslim, resistensi, 2015

Abstrack

Surakarta Mayor election in 2015 put issue of religion as an important. Candidates for mayor of non – muslim push nationalist vision forward in order to convince voters that the majority of islamic religion. Instead candidate for mayor of muslim religion makes islam religion issues part of a strategy to attract support. Election results resultant battle is certainly not a nationalist ideology versus Islam, December 9, 2015. FX Hadi Rudyatmo - Achmad Purnomo superior acquisition of 60% of the vote. Anung Indro Susanto - Muhammad Fajri 41% of the vote. Technics sample withdrawal multistage random sampling. The sampling frame in the form of the final voters list at 58 locations of the survey who had been randomized. Overall a total sample is 580 respondents. The results showed an ideological political map shows Surakarta muslim leadership aspirations of leadership shown by the rejection of non - Islamic by 26%. The rest 74% declared candidate for mayor permisip against non-Muslims.

Keywords: mayor lections, non-muslims, resistance

Pendahuluan

Gertz (1965) dalam deskripsinya tentang “Mojokuto” mengelompokan dasar kultural

masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok, yaitu *santri, priyayi, dan abangan*. Walaupun Indonesia bukanlah Jawa namun

kultur Jawa menjadi berpengaruh besar dalam kelembagaan politik nasional (Liddle; 1992). Karakter kelompok santri berpegang teguh pada ajaran – ajaran agama islam. Pada perkembangannya para santri secara kultural akan membangun fondasi – fondasi ideologi keislaman untuk meletakkan dasar – dasar politik ketatanegaraan. Sedangkan Kaum *priyayi* termanifestasi pada perilaku dan sikap ideologi nasionalis. Banyak dipengaruhi oleh budaya barat dan misi kegaan zending Kristen. Sedangkan sebagian besar komunitas *abangan* pada tradisi awal perpolitikan nasional lebih teridentifikasi pada kaum proletariat sosialisme komunis. Semenjak era orde baru kelompok proletariat sosialis komunis tak dapat mempertahankan eksistensinya karena ditekan dan dihanjurkan.

Politik aliran sebagaimana dikemukakan oleh Feith (1988) membagi ideologi politik nasional dalam lima aliran, yaitu nasionalism, sosialisme, komunisme, jawa, dan islam. Kelima aliran politik di Indonesia yang hidup dalam rentang waktu 1920 – 1965 itu terepleksi dalam partai – partai politik yang tumbuh subur hingga masa pemerintahan ordelama Presiden Soekarno. Dimasa orde baru, Presiden Soeharto meletakkan garis kebijakan depolitisasi. Partai politik memperoleh

tekanan hebat. Hanya dua partai politik yang diinginkan terlibat dalam perhelatan, yaitu partai dengan edologi nasionalis, tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) bergambang Kepala Banteng, dan Partai dengan ideologi islam, tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlambang Kakbah. Dari kalangan tehokrat dimunculkan sebuah kelompok bernama Golongan Karya sebagai jalan tengah untuk memberikan legitimasi kekuasaan dan pemerintahan negara. Aliran – aliran politik dimasa orde baru diberangus. Digantikan oleh ideologi baru bernama pembangunan (Suryadinata: 1992)

Pada masa reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim presiden Soeharto, politik aliran berusaha ditumbuhkan kembali melalui banyak partai politik. Setidaknya ada 24 Partai politik yang ikut pemilu tahun 1999. Pragmentasi politik aliran awal era reformasi tidak bertahan lama. Banyak partai politik yang akhirnya gulung tikar. Alir – aliran politik yang hendak ditumbuhkan gagal mengkristalisasi diri. Minim dukungan dan konstituen. Masyarakat mulai tidak percaya akan misi ideologi partai yang banyak. Pada pemilu terakhir (2014) hanya melahirkan 8 partai politik yang lolos *elementry treshold* 3%, yaitu: (1) Partai Nasional Demokrat; (2)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; (5) Partai Golongan Karya; (6) Partai Gerakan Indonesia Raya; (7) Partai Demokrat; (8) Partai Amanat Nasional; (9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); (10) Partai Hanura. Dua partai nasional lainnya yaitu PKPI dan Partai Bulan Bintang tidak lolos ke parlemen.

Aspek ideologis hingga perkembangan akhir partai politik di Indonesia tetap memisahkan dua aliran besar, yaitu nasionalis dan islam. Pertarungan ideologis pada setiap hajatan pemilihan umum dan kebijakan kenegaraan lainnya (Hassan: 1984). Ideologisasi Islam yang dianut oleh kelompok ideolog memiliki implikasi jauh dalam membangun sintesa ideologi nasional ketika itu. *Pertama*, pemikiran cita – cita negara berdasarkan pada ajaran Al – Quran dan Al Hadits semakin menegaskan struktur internal symbol – simbol keislaman. Panji-panji ideologi islam yang diusung kelompok ini menjadi pembeda dan kontras dengan ajaran – ajaran tentang kenegaraan yang bersumber dari eropah, yaitu Marxisme dan Nasionalisme sekuler. *Kedua*, Ideologisasi yang berkembang dalam pemikiran dan sikap – sikap kelompok menumbuhkan serta

memperkuat ikatan solidaritas secara politis, kultural maupun keagamaan. Ideologisasi berproses dan mengental sebagai suatu cita – cita yang mengajarkan instrumen untuk dipercaya dan terlembagakan. Ideologi yang berisikan seperangkan keyakinan akan fundasi kebangsaan itu merupakan rujukan identifikasi pemikiran, tingkah laku serta karakter perorangan dan membutuhkan kekuatan pengikat para penganutnya. Panji – panji ideologi yang mempresentasikan pemikiran, sikap dan perilaku individu semakin menegaskan jati diri dan integrasi kelompok ketika terjadi perbenturan struktur sosial. Ideologi sekuler, menumbuhkan peranan partai dan tokoh sekularis melakukan agregasi dan artikulasi politik dan kepentingan mereka. Hal sama secara seponatan memunculkan kepekaan keagamaan dan ideologi di kalangan umat Islam. Tokoh – khalifah islam Agus Salim, Ahmad Hassan, dan Mohammad Natsir, adalah kaum ideolog modernis universalis dan idealis. Para pemimpin pergerakan islam itu berkeyakinan ajaran islam sebuah keniscayaan yang abadi berasal dari tuhan yang maha esa, karena itu wajib dilakukan secara penuh. Berdasarkan Al – Quran dan Hadist para umat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara (Noer: 1990)

Kalangan nasionalis Islam menghendaki agar Islam-lah yang meletakkan dasar ideologi perjuangan menghadapi kolonial, sedangkan kelompok nasionalis sekuler menghendaki dasar Nasionalisme yang lepas dari Islam. Mereka yang menyebut kelompoknya sebagai golongan "Kebangsaan" nasionalis sekuler, menuntut agar Nasionalisme yang jepas dari paham agama manapun, yang harus dijadikan dasar ideologi perjuangan. Mereka sebagaimana kalangan pragmatis pada umumnya menganggap agama pada dasarnya merupakan "urusan pribadi dan individual". Agama sulit memberikan dasar yang kokoh untuk suatu ideologi nasionalis yang mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan seluruh kelompok suku, agama dan yang beraneka ragam di Indonesia (Renan, 1994)

Di kalangan nasionalis sekuler terdapat keyakinan bahwa pengalaman historis (sejarah) dan kehendak hidup bersamalah yang dapat dijadikan dasar ideologi perjuangan bangsa. Mereka diilhami oleh pendapat Ernest Renan tentang pengertian "bangsa" (nation). Dalam salah satu tulisannya, Renan mengemukakan teori tentang pembentukan ideologi bangsa. Bangsa adalah suatu "asas rohani, yang timbul dari keadaan-keadaan historis yang

tersusun secara mendalam." Terbentuknya asas rohani ini, tidaklah cukup dengan ras, bahasa, agama, atau kepentingan bersama saja (Bastian, 1972). Terlebih lagi adalah keinginan untuk hidup bersama. Pemujaan nenek-moyang adalah (ibadat) yang paling sah; nenek-moyang kita seperti diri kita sebagaimana kita sekarang ini. Jadi bangsa itu adalah suatu solidaritas besar, membutuhkan pengorbanan untuk bersedia berkompromi memberikan tempat bagi yang lain yang kemudian disebut sebagai paham pluraris. Kebangsaan yang satu dalam keragaman kepercayaan agama, adat istiadat, suku, bahasa dan sebagainya.

Pilkada Surakarta 2015 menarik untuk dijadikan lokus penelitian ini, bukan semata daerah asal Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan atau kota penting titik tolak karier politik Jokowi. Sejarah politik nasional banyak yang dikaitkan dengan kota di posisi tengah Pulau Jawa ini. Sejarah panjang menempatkan "perang" ideology nasionalis vs islam bermula di Solo, sebutan lain Kota Surakarta. Tahun 1918 terjadi peristiwa Djawi Hisworosebuah harian yang terbit di Solo untuk pertamakalinya sebuah artikel yang ada di dalamnya dianggap menghujat Nabi Muhammad. Pada tahun yang sama pula juga terbit Kitab Darmogandul. Isi buku ini dianggap

menghina ajaran Islam dan kehormatan Nabi Muhammad.

Gelaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak untuk pertama kali dilakukan di Indonesia pada 9 Desember 2015. Tercatat 425 berlangsung pada hari yang sama, walaupun ada beberapa daerah yang terpaksa ditunda. 326 diantaranya pemilihan bupati atau walikota dan 9 pemilihan gubernur. Diantara penyelenggaraan pilkada serentak tersebut adalah pemilihan walikota Surakarta untuk masa jabatan walikota – wakil walikota Surakarta 2016 – 2021. Dua pasangan calon walikota – wakil walikota tidak dapat mungkir dari aroma persaingan ideologi. Pasangan petahana FX. Hadi Rudyatmo sebagai walon walikota berpasangan dengan tokoh islam Achmad Purnomo diusung oleh PDIP. Pasangan ini lebih merepresentasikan garis ideology nasionalis walaupun beberapa Parpol Islam semisal (PKB) ada dibarisan pasangan ini. FX Hadi Rudyatmo yang beragama nsrani tak terhindarkan memunculkan reaksi kalangan islam garis keras menentang habis kepemimpinan non muslim. Parpol berbasis islam diantara PKS, PAN, PPP, Parpol Bulan Bintang berkolaborasi dengan parpol lain berbasis nasionalis lainnya seperti Golkar, dan Demokrat memunculkan tokoh Anung Indro

Susanto sebagai calon walikota berpasangan dengan Muhammad Fajri.

Dari sisi parpol penganut pasangan calon walikota – wakil walikota Pilkada Surakarta 2015, sejatinya tidaklah dapat diterjemahkan sepenuhnya nurni persaingan ideology. Ichlasul Amal (1990) menempatkan ideology dan pragmatism sebagai roh utama penggerak partai politik di Indonesia. Ada bauran pragmatism di Pilkada Surakarta 2015.

Penelitian ini membatasi dari pada lingkup pertanyaan, berapa persen resistensi pemilih terhadap calon walikota beragama non muslim pada pemilihan umum kepala daerah Kota Surakarta, tahun 2015. Rumusan masalah penelitian dapat dijabarkan: (1) Berapa persen pemilih yang menyatakan tidak akan memilih calon walikota beragama non muslim, walaupun pasangan calon wakil walikotanya beragama islam; (2) Berapa persen pemilih yang memilih calon wakil walikota beragama islam, walaupun pasangan calon walikotanya beragama non – muslim?; (3) Berapa persen aspirasi pasangan walikota – wakil walikota yang edeal dari komposisi agama?; (4) Bagaimana identifikasi resistensi calon walikota non muslim berdasarkan kategori pemilih berdasarkan agama, pekerjaan, kelompok usia, ekonomi rumah tangga.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menggambarkan suatu keadaan yang menjadi focus penelitian, yaitu calon kepala daerah dengan atribut negative (gender perempuan, berusia tua, dan beragama minoritas) pada pemilihan umum kepala daerah. Penggambaran (*description*) tersebut berdasarkan pada hasil analisis angka – angka baik dalam bentuk numeric maupun prosentase dari suatu frekuensi.

Populasi adalah pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Berdasarkan data pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 jumlah pemilih di Kota Surakarta sebanyak 408.591 pemilih yang terdistribusi kedalam 5 kecamatan, yaitu Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Jebres dan Banjarsari. Sedangkan kelurahan yang ada berjumlah 51. DPT pilpres 2014 terbagi dalam 1.371 TPS. Data pemilih pemilu Pilpres 2015 bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta.

Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *cuplikan random sampling*. Pemilih dipetakan dalam wilayah kelurahan. Pada masing – masing kelurahan pemilih dikelompokkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pencobosan

pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Secara umum disetiap kelurahan terdapat beberapa titik lokasi survey (TLS) bergantung pada tingkat penyebaran dan karakteristik kewilayahan yang ada di kelurahan tersebut. Pengacakan dilakukan dalam dua tahap, *pertama* pengacakan untuk menentukan TLS diantara sejumlah TPS yang ada di kelurahan; *kedua* pengacakan dilakukan terhadap daftar nama pemilih yang terdapat pada DPT – TPS terpilih untuk menentukan sejumlah responden. Penelitian ini menggunakan DPT sebagai kerangka sampel. Teknik pengacakan menggunakan alat bantu *software* yang ada di www.rondam.org.

Berdasarkan teknik sampling yang dilakukan, penelitian ini menetapkan Titik Lokasi Survey (TLS) berjumlah 58 TLS, terdistribusi di Kec. Laweyan 11 TLS/110 responden; Kec. Serengan 7 TLS/70 responden; Kecamatan Pasar Kliwon 10 TLS/100 responden; Kecamatan Jebres 14 TLS /140 responden; Kecamatan Banjarsari 15 TLS /160 responden. DPT pada TPS – TPS terpilih sebagai TLS diacak guna menentukan Responden. Tiap TLS ditentukan sebanyak 10 responden diacak dari DPT TPS terpilih (TLS). Keseluruhan responden survey berjumlah **580 responden**; (3) *Margin error* pada level 4%

pada tingkat signifikansi 95%. Teknik analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif dengan alat bantu table frekuensi dan *cross – table*. Tabulasi data dan pengorganisasian data menggunakan program SPSS.15.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peta politik masing – masing partai politik di Kota Surakarta tergambar dari hasil pemilihan umum legislative (Pileg) tahun 2014. Pileg 2014 salah satunya memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Berdasarkan hasil Pileg 2014 PDI – Perjuangan berhasil mengungguli perolehan suara di semua daerah pemilihan. Perolehan suara pemilihan untuk PDI sebanyak 152.250 suara sah atau 51% menempatkan 25 orang kader partai di kursi dewan. Hasil Pileg 2015 menempatkan PDIP sebagai parpol mayoritas tunggal, karena menguasai lebih dari separa kursi parlemen kota Surakarta.

Diluar PDIP partai politik yang berhasil mendudukan wakil partai di dewan adalah: (1) GERINDRA memperoleh 22.104 suara sah; (2) PAN memperoleh 20.716 suara sah; (3) GOLKAR memperoleh 19.876 suara sah; (4) PKS memperoleh 19.562 suara sah; (5) DEMOKRAT memperoleh 15.123 suara sah; (6) HANUARA memperoleh 14.674 suara sah;

(7) PPP memperoleh 13.961 suara sah; (8) NASDEM memperoleh 8.253 suara sah; dan PKB memperoleh 8.109 suara sah.

Data perolehan suara sah pemilu legislative Kota Surakarta 2015 memperlihatkan empat lapis kekuatan politik. PDIP sebagai parpol mayoritas tunggal (51%) sedangkan parpol menengah adalah GERINDRA, PAN, GOLKAR, PKS dan DEMOKRAT berada pada prosentase 7%-an. Parpol MENENGAH bawah ditempati oleh HANURA dan PPP pada posisi 5%-an. Sedangkan Parpol bawah ditempati oleh NASDEM dan PKB di posisi 3%-an.

Perebutan kursi kepala daerah pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2015 hanya menempatkan dua pasangan calon wali kota – wakil walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah masa bakti 2016 – 2022. PDIP sebagai parpol mayoritas tunggal mengusung pasangan *incumbent* Calon walikota FX. Hadi Rudiantmo menjabat Walikota Surakarta (2012 – 2015), calon wakil walikota Achmad Purnomo menjabat Wakil Walikota Surakarta (2013 – 2015). Sejak awal pasangan RUDY – PUR ini dipandang sebagai pasangan penuh keyakinan akan memperoleh dukungan penuh masyarakat pemilih Kota Surakarta. Betapa tidak, Pasangan calon wali kota –

wakil wali kota lengkap maju pada gelaran Pilkada sebagai pasangan petahana diusung oleh PDIP sebagai parpol mayoritas tunggal, memperoleh dukungan parpol lainnya seperti NASDEM (3%); PKB (3%); HANURA (5%), sempalan GOLKAR dan Sempalan PPP. Disebut sempalan karena ketika berlangsung Pilkada kedua parpol tersebut dalam situasi kepengusan ganda yang memiliki sikap politik berbeda di Pilkada Surakarta.

FX Hadi Rudyatmo menjabat sebagai Walikota Surakarta semenjak jabatan itu ditinggalkan Jokowi yang memenangi Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sebelumnya RUDY sebutan untuk FX Hadi Rudyatmo menjabat Wakil Walikota Surakarta sejak tahun 2005. Posisi structural di PDIP Rudy adalah ketua DPC PDIP Kota Surakarta. Dikenal luas sebagai sosok mengakar dilingkungan *grassroad* partai moncong putih. Rudy beragama nasrani taat, walaupun secara tegas ia menyatakan dirinya seorang Sukarnois. Bagi kalangan islam garis keras di Kota Surakarta sulit menerima mereka yang memiliki keyakinan non muslim menjadi wali kota. Hal demikian disadari betul oleh kalangan internal PDIP. Penempatan Achmad Purnomo sebagai calon wakil walikota

diharapkan dapat menetralsir menguatnya resistensi kepemimpinan non – muslim, sekaligus merangkan sebagian elmen islam lainnya.

Achmad Purnomo tokoh pengusaha muslim Kota Surakarta. Berkecimpung dalam arena politik bukan hal baru. Ia sempat mencalonkan Walikota Surakarta di pilkada 2005, namun kalah bersaing dengan Jokowi. Sempat tenggelam dalam perpolitikan local Purnomo kembali memasuki dunia politik ketika Jabatan Wakil Walikota Surakarta kosong sebagai akibat naiknya wakil walikota Rudy ke jabatan wali kota.

Pasangan calon kedua dari gelaran Pilkada Surakarta 2015 adalah Anung Indo Susanto sebagai calon walikota dengan Muhammad Fajri sebagai calon wakil walikota. Anung merupakan birokrat karier di Pemerintahan Kota Surakarta. Jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Penanggulangan Masyarakat Miskin (Bapermaskin). Pada periode kepemimpinan Walikota Surakarta sebelumnya, Anung dikenal dekat dengan Joko Widodo. Anung menduduki jabatan Kepala Bagian Keuangan hingga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedang Mohammad Fajri aktivis politik kader Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)

Kota Surakarta. Pernah menjadi anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009 – 2014.

Pasangan Anung – Fajri (AFI) maupun pasangan Rudy – Pur sebelum penetapan resmi sebagai pasangan calon walikota – wakil walikota mengalami kejutan – kejutan polik. Sebagai bakal calon walikota yang diusung gabungan partai politik yang menamakan diri Koalisi Solo Bersatu (KSB), anung ditentukan lebih awal sebelum pengisian bakal calon wakil walikota. Pada Tahap pertama Anung dan KSB lebih menghendaki nama Umar Hasyim Ketua PAN yang menduduki Jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta periode 2014 – 2019. Namun dalam perjalanannya Umar Hasyim mengundurkan diri. Dari nama – nama lainnya pilihannya adalah Fajri dan Muhammad Taufiq, dan pilihan jatuh kepada Fajri.

PDIP Kota Surakarta sebagai partai mayoritas sejak awal banyak kalangan menduga akan menetapkan bakal calon walikota sang ketua DPC yang sekaligus menduduki jabatan walikota *incumbent* FX. Hadi Rudyatmo. Proses awal penjaringan bakal calon wali kota – wakil walikota dari Parpol moncong putih mengidentifikasi tidak kurang dari tujuh kandidat, yaitu: FX. Hadi Rudyatmo, Achmad Purnomo, Ginda Farach Triawan; Hartanti, Hilmi A.

Sakdillah, dan Rachmad Wahyudi. Kejutan terjadi ketika Achmad Purnomo yang melamar bakal calon walikota ditunjuk sebagai wakil – walikota kembali mendampingi Rudy.

Isu Kepemimpinan Islam

Hajatan Pilkada Surakarta 2015 seakan membuka lagi gairah persaingan ideology islam *versus* non muslim. Setelah ditinggalkan Walikota Jokowi (2013) yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi Presiden RI. Kekuasaan pemerintahan Kota Surakarta berlimpah ke Wakil Walikota. FX Hadi Rudyatmo seorang nasionalis beragam nasrani taat oleh sebagian kalangan muslim dipandang sebagai sosok yang belum dapat ia terima sebagai pemimpin Kota Surakarta. Kekawatiran gerakan penentangan terhadap Rudy sebagai walikota bias membahayakan stabilitas social politik. Karena itulah segera setelah jabatan walikota kosong elite PDP Perjuangan menentukan Achmad Purnomo nemempati posisi Wakil Walikota. Purnomo dipandang sebagai tokoh muslim dengan pengaruh luas. Duet Rudy – Purnomo (2013 – 2015) setidaknya berhasil meredam gejala protes kalangan muslim.

Penentuan bakal calon wakil walikota Achmad Purnomo yang mendampingi bakal calon walikota Rudy

maju pilkada 2015 untuk jabatan walikota – wakil walikota Surakarta periode 2015 – 2010 tidak lepas dari pertimbangan resistensi yang begitu kuat sebagian kalangan islam terhadap kepemimpinan Rudy yang dipresentasikan sebagai kekuatan non muslim. Pasangan Rudy – Purnomo diperkirakan mampu memenangkan pilkada 2015. Stabilitas pemerintahan kota Surakarta diharapkan tetap terjadi sebagaimana yang selama ini telah berlangsung. Pasangan kepemimpinan Non – Muslim dan Muslim atau Nasionalis – Islam diharapkan mampu memberikan keseimbangan menciptakan gejala dan resistensi kalangan islam garis keras lainnya.

Gabungan Partai politik KSB sebenarnya campuran partai politik berbasis ideology islam dan nasionalis. Latar belakang ketokohan yang usung sebagai calon walikota Anung lebih mengesankan sebagai tokoh nasionalis beragama islam. Pada suatu kesempatan Anung menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang nasionalis, bahkan pilihan Partai Politik ketika Pileg 2014 adalah PDIP. Sedangkan Mohammad Fajri dalam lingkup pergaulan antar tokoh islam di Kota Surakarta tidaklah dalam kategori tokoh sentral. Fajri lebih tepat diposisikan sebagai kader dan aktivis islam biasa. Dalam

pergaulannya tokoh Umar Hasyim lebih representative dibanding Fajri. Namun demikian penelitian ini mencatat pasangan Anung – Fajri tak dapat dipungkiri mampu menjadi symbol dan menyatukan kekuatan politik islam yang ada. Hal ini setidaknya terdeteksi dari hasil Pilkada 9 Desember 2015 dengan memperoleh suara pemilih sebesar 41%. Pertanyaannya apakah hasil Pilkada 41% suara pemilih Anung – Fajri adalah kekuatan politik Islam?. Berapa sebenarnya tingkat resistensi kepemimpinan non muslim di Kota Surakarta?

Survey ini dilaksanakan pada Juni 2015 atau lima bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2015. Pada saat survey tentu peneliti tidak hanya menanyakan hal – hal yang terkait dengan resistensi kepemimpinan non – islam. Berikut ini di paparkan pertanyaan yang diajukan dan jawaban responden:

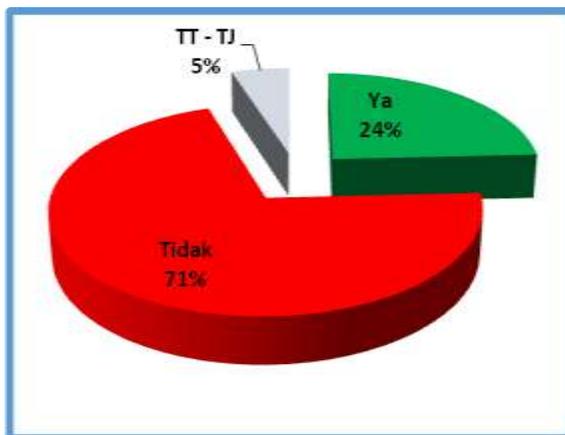
1. Apakah anda menginginkan walikota Surakarta mendatang (2016 – 2020) seagama (seiman) dengan anda?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keinginan murni dari masyarakat kota Surakarta yang menjadikan keyakinan agama yang dianutnya mempengaruhi perilaku pilihan politik dalam menentukan

calon walikota. Seberapa banyak mereka yang beragama islam menghendaki walikota beragama islam. Seberapa banyak mereka yang beragama non islam menghendaki walikota beragama non islam.

Pilihan Jawaban terdiri dari tiga opsi: (1) Ya; (2) Tidak; dan (3) Tidak Tahu – Tidak Jawab. Distribusi jawaban Gambar 1

Gambar 1. Distribusi Jawaban pertanyaan “Apakah anda menginginkan walikota Surakarta mendatang (2016 – 2020) seagama (seiman) dengan anda?”



Gambar 1.1. menunjukkan 24% masyarakat menginginkan Walikota mendatang seagama dengan mereka, selebihnya atau mayoritas (71%) tidak mengkaitkan walikota

mendatang dengan kesamaan agama. Data ini mengindikasikan sebenarnya hanya 24 % saja yang mengaitkan pilihan politik dengan keyakinan agamanya.

2. Kenyakinan agama pasangan walikota – wakil walikota Surakarta (2016 – 2020) komposisi yang paling anda inginkan?

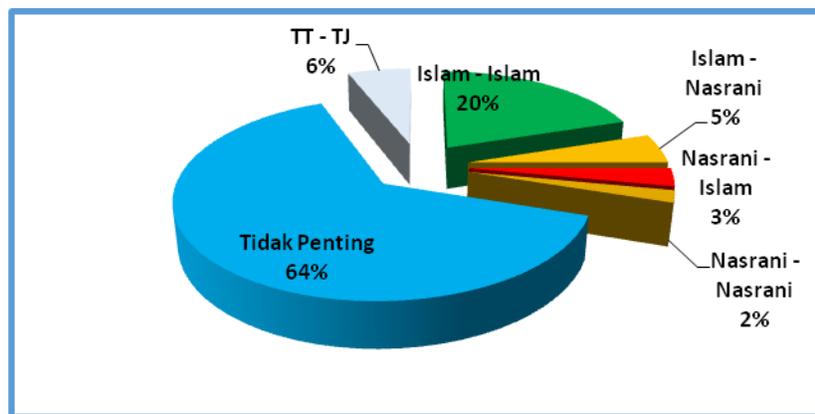
Pertanyaan ini didasarkan pada dua asumsi. Pertama, sebagian besar masyarakat Surakarta telah memiliki kedewasaan perilaku

politik dengan tidak selalu mengkaitkan pilihan politik dengan agamanya. Kedua, realitas politik di Surakarta dipimpin oleh walikota (FX. Hadi Rudyatmo) beragama nasrani dan didampingi oleh wakil walikota (Achmad Purnomo) tokoh islam. Empat opsi pilihan jawaban

responden atas pertanyaan ini: (1) Walikota islam – Wakil Walikota islam; (2) Walikota islam – Wakil Walikota non islam; (3) Walikota

non islam – Wakil Walikota Islam; dan (4) Walikota non islam – Wakil Walikota non islam. Distribusi jawaban responden gambar 2.

Gambar 1. Distribusi Jawaban Pertanyaan “Kenyakinan agama pasangan walikota – wakil walikota Surakarta (2016 – 2020) komposisi yang paling anda inginkan?”



Gambar 1.1. menunjukkan, pasangan walikota – wakil walikota keduanya beragama islam dinilai ideal oleh 20% responden. Komposisi keyakinan agama pasangan walikota – wakil walikota dinilai tidak penting (64%). Artinya Keyakinan agama walikota – wakil

walikota TIDAK menjadi pertimbangan mayoritas masyarakat (64%) dalam menentukan sikap politiknya. Data ini sekaligus menegaskan sikap politik yang menginspirasi kepemimpinan walikota beragama islam 25%.

3. Pendapat Anda apabila calon Walikota Surakarta 2015 - 2020 beragama Nasrani ?

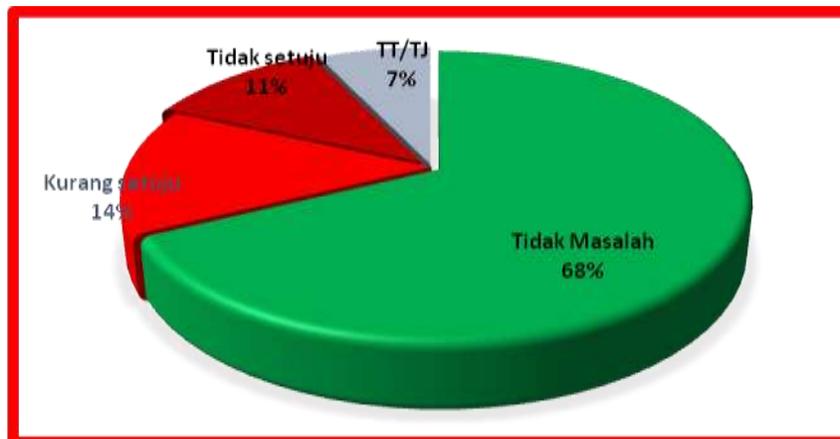
Pertanyaan ini, lebih tegas dibanding dua pertanyaan

sebelumnya dalam mencari jawaban tentang resistensi kepemimpinan non islam pada Pilkada Surakarta 2015. Opsi jawaban yang disediakan adalah: (2) Sangat tidak setuju; (2)

Tidak Setuju; (3) Kurang Setuju; (4)
Setuju; (5) Sangat setuju; (6) Tidak

Tahu – Tidak Jawab.

Gambar 3. Distribusi Jawaban Pertanyaan, “Pendapat Anda apabila calon Walikota Surakarta 2016 - 2021 beragama nasrani ?



Hasil Survey Gambar 3 jawaban opsi (1) sangat tidak setuju dan (5) sangat setuju sebagai opsi jawaban “ekstrim” tidak ada yang memilih. Survey ini mengidentifikasi resistensi terhadap kepemimpinan walikota Surakarta sebesar 25%. Masyarakat cenderung tidak setuju dan kurang setuju bila calon

Walikota Surakarta beragama nasrani 11% dan 14%. Hal ini dapat dimaknai tingkat resistensi agama nasrani utk menjadi calon walikota sebanyak 25%. Sedangkan 68% responden lainnya menyatakan setuju atau tidak ada masalah Walikota Surakarta (2016 – 2021) beragama nasrani.

Ketiga indikator dalam bentuk pertanyaan survey yang diajukan penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa aspirasi kepemimpinan islam pada pilkada Surakarta 2015. Aspirasi kepemimpinan islam adalah kehendak masyarakat untuk memimiliki walikota beragam islam dan menolak

pilihan walikota beragama non islam. Besarnya prosentase aspirasi kepemimpinan islam pada pilkada Surakarta 2015 sebesar 20 % hingga 32%. Angka prosentase resistensi terendah (20%) diperoleh dari pertanyaan nomor 1 “ Apakah anda menginginkan walikota Surakarta

mendatang (2016 – 2020) seagama (seiman) dengan anda?. Sedangkan angka prosentase resistensi kepemimpinan non islam tertinggi diperoleh dari jawaban pertanyaan nomor 3 “ Pendapat Anda apabila calon Walikota Surakarta 2016 – 2021 beragama nasrani?”, yaitu 68% responden setuju walikota Surakarta 2016 – 2021 beragama nasrani, selebihnya dianggab sebagai sikap menolak walikota nasrani (32%).

Penutup

Pilkada 9 Desember 2015 menunjukkan suara pemilih pasangan Anung – Fajri (41%). Pasangan Rudy – Purnomo unggul (62%). Bila di hubungkan dengan resistensi kepemimpinan non muslim, hasil penelitian ini mengindikasikan pasangan Anung – Fajri sebenarnya dapat dikatakan sangat berhasil mengkapitalisasi gerakan anti kepemimpinan non muslim secara maksimal (32%). Ada suara (10%) suara pemilih Anung – Fajri yang berasal dari mereka yang sebenarnya tidak menolak kepemimpinan non muslim. Mereka adalah memilih Anung – Fajri lebih karena factor lain diluar factor agama.

Hasil survey ini, peneliti memaknakan bahwa kekuatan idelogi politik islam dikalangan masyarakat Kota Surakarta maksimal sebesar 32%. Sebaliknya kekuatan

idelogi nasional lebih mayoritas 68%. Tentu kesimpulan hasil penelitian ini sebagai thesis baru, perlu kajian lebih lanjut. Bila demikian adanya partai politik yang mengandalkan idelogi politik islam dalam mengidentifikasi pemilih, silahkan berhitung ulang. PAN, PKS, PPP, PKB, PBB *coverage* mereka tidak lebih dari 32%

Pasangan Anung – Fajri berhasil memperoleh suara melebihi basis ideology islam, yaitu sebesar 39,69%. Artinya ada sekitar 10% suara pemilih berasal dari aspek diluar ideology islam. Aspek tersebut diduga aspek pragmatism politik dan aspek rasionalis yang berasal dari persepsi pemilih atas kinerja pemerintahan *incumbent*. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan kajian lebih mendalam atas dua aspek tersebut.

Daftar Pustaka

- Ernest Renan (1994), *Apakah Bangsa Itu?* Alumni – Bandung.
- Eriyanto, 2004, *Metodologi Polling Memberdayakan Suara Rakyat*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Feith, Herbert & Lance Castles (ed), 1988, *Indonesian Political Thinking 1945-1966*, (Ithaca: Cornell University Press, 1970) dan Herbert Feith & Lance Castles(ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1845-1966*, Jakarta: LP3ES.

- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981
- Hasan, A. 1984, "Soal Jawab," dalam G. F. Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terjemahan: Tujimah dan Jessy A., Jakarta: UI Press
- Ingleson, 1981, *Jalan Ke Pengasingan*, Terjemahan: Zamaksyari Dhofier, Jakarta, LP3ES
- Kahin, Geroge Mc. Turan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, PT. Pustaka Sinar Harapan – Jakarta.
- Muchtarom, Zaini, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Noer, Daliar, 1990, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, LP3ES – Jakarta
- Pals, Daniel L., *Seven Theories of Religion; dari Animisme E.B. Taylor, Materialisme Karl Marx hingga Antropologi Budaya C. Geertz*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2001
- Liddle, R. William, 1992, *Pemilu Pemilu Orde Baru pasang Surut Kekuasaan Politik*, akarta: LP3ES.
- , 1992, *Partisipasi Politik dan Partai Politik : Indonesia pada awal Orde Baru*, Jakarta: Pustaka utama Grafiti Press.
- Robert Van Niel, 1984, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, terjemahan: Zahara Deliar Noer, Jakarta: Pustaka Jaya
- Suryadinata, Leo, 1992, *Golkar dan Militer : Studi Tentang Budaya Politik*, Jakarta: LP3ES
- Wirjosanjoyo, Sukiman, 1984 "Tantangan Terhadap Agama Islam," dalam Amir Hamzah (ed.), *Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot*, Malang: LP2LPM